

Menelusuri Arus Migrasi di Lampung dalam Tiga Masa

Setio Widodo^{1*}, Endang Supriatin

¹Guru Sejarah SMA Negeri 1 Pekalongan, Indonesia

²Guru Sejarah SMA Negeri 2 Sekampung, Indonesia

*e-mail korespondensi: setiowidodo1969@gmail.com

Received 26 March 2023; Received in revised form 12 April 2023; Accepted 12 April 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tiga peristiwa Migrasi dari tiga masa pemerintahan disertai dengan perbandingan pelaksanaan kegiatannya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, metode sejarah dengan langkah sebagai berikut: (1) Heuristik, (2), Kritik Sumber, (3) Intepretasi, (4) Historiografi. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Migrasi masa Kolonial Belanda (Kolonisatie) diperuntukkan memenuhi penyebaran penduduk untuk kepentingan penjajah Belanda dibidang perkebunan dan tenaga kerja, masa penduduk Jepang (kokuminggakari) diperuntukkan membantu ekonomi perang Jepang, dan migrasi masa Pemerintahan RI, diperuntukkan untuk penyebaran penduduk, perbaikan ekonomi dan mengurangi kepadatan penduduk pulau Jawa, salah satunya pelaksanaan migrasi di Lampung yang menjadi Pionir proyek Perpindahan penduduk di tiga masa pemerintahan.

Kata kunci: migrasi, kolonisasi, kokuminggakari, transmigrasi.

Abstract

This study aims to describe three events of Migration from three reigns accompanied by a comparison of the implementation of their activities. This research uses literature study, historical method with the following steps: (1) Heuristics, (2), Source Criticism, (3) Interpretation, (4) Historiography. The research results obtained were that the Migration during the Dutch Colonial period (Kolonisatie) was intended to fulfill the population distribution for the interests of the Dutch colonialists in the field of plantations and labor, the Japanese population period (kokuminggakari) was intended to help Japan's war economy, and the migration during the Indonesian Government, was intended for population distribution, improvement economy and reducing the population density of the island of Java, one of which is the implementation of migration in Lampung which became a pioneer of the population transfer project in three government periods.

Keywords: migration, colonization, kokuminggakari, transmigration

PENDAHULUAN

Perbaikan ekonomi setelah lahirnya politik etis menjadi tujuan awal perlunya perpindahan penduduk mengingat Penduduk Pulau Jawa yang cukup padat (J. Setiawan, 2023), memungkinkan menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintahan Kolonial Belanda, karena kemungkinan Kemiskinan, kelaparan dan kriminalitas akan mengganggu kondisi pemerintahan saat itu. Pada awal abad 20

dengan situasi seperti hal itu pemerintah melakukan perpindahan penduduk ke luar pulau jawa. Diawali dengan program Kolonisatieproof pemerintah Belanda melakukan percobaan pertama, dilakukan di Lampung tahun 1905 terbilang sukses, sehingga dilanjutkan untuk melakukan program migrasi (kolonisasi) berikutnya dengan tujuan tidak hanya di Lampung tetapi daerah Sumatera lainnya yang memiliki lahan cukup luas, sampai

akhirnya Belanda menyerah kalah terhadap Jepang pada tahun 1942 (J. Setiawan & Aman, 2018).

Pelaksanaan Migrasi perpindahan penduduk juga dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang, kemudian dilanjutkan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia setelah merdeka dengan program yang dinamakan Transmigrasi. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Suharto dibentuk sebuah lembaga atau badan yang mengurus migrasi penduduk ini yang disebut dengan Departemen Transmigrasi atau kemudian berubah lagi menjadi Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (HERI, NURHAJI, 2017; N. Setiawan, 2006).

Dari kegiatan migrasi di tiga masa pemerintahan tersebut permasalahan utama adalah kepadatan penduduk di pulau Jawa perlu dilakukan perpindahan karena akan menimbulkan masalah sosial yang mengganggu pemerintahan, perbaikan ekonomi dan taraf hidup serta pemerataan penduduk menjadi tujuan utama dalam kegiatan migrasi tersebut dengan kepentingan masing masing pemerintahan yang berbeda.

Tulisan ini berupaya mengungkap sebuah peristiwa yang terjadi di provinsi Lampung sesuai dengan masa nya tiga pemerintahan dengan pembeda pada masa pemerintahan masing masing. Yakni masa pemerintahan Kolonial Belanda, Pendudukan Jepang dan masa pemerintahan negeri sendiri Republik

Indonesia. Sehingga pengungkapan dalam tulisan ini mendiskripsikan satu kegiatan migrasi penduduk pada masa pemerintahan yang berbeda. Permasalahan utama dalam penulisan ini adalah perbedaan antara pelaksanaan migrasi dari tiga pemerintahan, dengan analisis dampaknya dari masa tiga pemerintahan dan perkembangannya. Diharapkan dalam penelitian dan penulisan ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya khususnya bagi dunia pendidikan yang peduli sejarah dan masyarakat pada umumnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang menurut (Kuntowijoyo, 2013) terdiri atas lima langkah, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi, dan (5) penulisan (Wasino, 2020). Topik dalam kajian ini mengenai sejarah pengadilan di Batavia tahun 1619-1942. Sumber sejarah yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari situs Delpher yang di antaranya berasal dari *de Indische Courant*, *Bataviaasch Nieuwsblad*, dan *de Locomotief*. Sementara sumber sekunder diperoleh dari berbagai perpustakaan (Dinda, Aman, & Setiawan, 2019), utamanya yang menyangkut Batavia, seperti buku *The Archives of the Dutch East India Company*

(VOC) and the Local Institutions in Batavia (Balk et al., 2007), *Jakarta: Sejarah 400 Tahun* (Blackburn, 2011), dan *Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII* (Niemeijer, 2012).

Setelah tahap heuristik, dilakukan kritik sumber. Penelitian ini dipastikan menggunakan sumber-sumber yang asli, kredibel, dan sesuai dengan topik. Langkah berikutnya melakukan interpretasi sumber. Pada tahap ini dilakukan analisis dan sintesis. Terakhir adalah tahap penulisan (Agbedahin, 2019; Bavli, 2016; Beghetto, 2007; Sinakou, Boeve-de Pauw, Goossens, & Van Petegem, 2018).

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah melalui kajian kepustakaan, dengan metode penulisan sejarah karena penulisan ini mengambil obyek peristiwa yang telah terjadi masa lampau. Dalam menggambarkan suasana migrasi literatur yang digunakan adalah tulisan Heyting dalam buku *De Indische Gids*, yang memperkuat pelaksanaan Migrasi (H.G., 1938), tulisannya Heyting sebagai orang yang dipercaya dalam penelitian dalam pelaksanaan Migrasi (Kolonisasi) sebelum *Kolonisatieproof* dilaksanakan. Sedangkan untuk masa pendudukan Jepang, masa *Romusha* dan pengerahan tenaga kerja tulisan Aiko Kurasawa (Kurasawa, 1993) dijadikan panduan yang dipadukan dengan Tulisan Kartodirdjo dalam sejarah Nasional Indonesia (Kartodirdjo, 2018). Sedangkan

migrasi masa Pemerintahan Republik Indonesia bahan keputakaannya diantaranya adalah tulisan H.J. Heeren (Heeren, 1979) dan literatur lainnya untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan informasi yang relevan dalam tulisan ini. Hasil dari tulisan ini adalah suatu Historiografi tulisan yang berbentuk deskriptif analisis dari berbagai buku dan sumber yang berbea tersebut menjadi sebuah tulisan sejarah berkaitan dengan migrasi yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolonisasi (Masa Hindia-Belanda)

Pelaksanaan Politik etis pada awalnya memberi angin segar terhadap perkembangan rakyat di negeri jajahan, karena dalam teorinya akan mengangkat kesejahteraan bagi bangsa Hindia Belanda yang telah di kuasai oleh Belanda cukup lama, *etische politiek* dengan edukasi, irigasi dan kolonisasi (migrasi) Penduduk menjadi target utama pemerintah kolonial, akan tetapi kenyataannya pelaksanaan politik etis di tanah Hindia (Indonesia) sangat terbatas, irigasi didirikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah dan kebun kebun milik pemerintah maupun partikelir, edukasi untuk rakyat pribumi dibatasi hanya keturunan bangsawan dan pegawai pemerintah. Mobilitas penduduk hanya untuk pemerataan penduduk untuk mengisi lahan kosong dan membuka kawasan baru dengan mempersempit

wilayah adat. Demikian pula dengan kolonisasi dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan sosial yang mengancam pelaksanaan pemerintahan kolonial di Jawa yang jumlah penduduknya padat.

Kerawanan sosial sangat rentan terjadi di daerah yang padat penduduknya, kemiskinan, dan kurangnya lahan pekerjaan sehingga antara penduduk dan pekerjaan tidak berimbang, pembangunan sarana fisik seperti jembatan dan jalan tujuannya adalah mempermudah mobilisasi administrasi dan pergerakan pasukan dari berbagai arah jika keadaan yang tidak diinginkan terjadi. Hal ini menjadikan pengalaman yang telah terjadi adanya pemberontakan dan kebencian masyarakat lokal karena terampasnya kedudukan dan status sosial.

Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mulai memikirkan kemungkinan terlaksananya kolonisasi, yaitu penempatan petani-petani daerah yang padat penduduknya di Jawa, di desa-desa baru yang disebut “koloni” di daerah kosong di luar Pulau Jawa sebagai salah satu jalan untuk memecahkan masalah kemiskinan. Awal mula terbentuknya Politik Etis berakar dari sebuah pemikiran akan masalah kemanusiaan dan kondisi ekonomi. Pada abad ke 19 banyak orang yang telah mengembangkan semangat dalam melakukan balas budi, bahkan sebagian orang atau kaum Belanda memiliki rasa prihatin terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat pribumi atau

rakyat Indonesia jika hal ini tidak segera dicarikan jalan keluar tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah soal yang lebih besar (Anggraeni & Setiawan, 2022; Putri, 2017).

Wilayah luar pulau Jawa memiliki lahan yang cukup luas dan tidak terurus, sementara di pulau Jawa semakin sesak, terutama di Jawa Tengah, hal ini sesuai dengan penggambaran Heyting tentang keresidenan Kedu yang jumlah masyarakatnya cukup banyak dan lahan pertanian dan pekerjaan yang sulit untuk didapatkan maka perlu segera dilakukan perpindahan penduduk. Berdasarkan data statistik tahun 1900 an penduduk pulau Jawa telah mencapai angka 28.746.638 jiwa dan keadaan itu meningkat drastic pada duapuluh tahun berikutnya yang mencapai angka 34.984.171 jiwa. Sementara jumlah pulau Jawa yang tidak terlalu luas pertumbuhan itu mengkhawatirkan karena pada tahun yang sama daerah lain diluar pulau Jawa angka penduduknya hanya 6.575.878 jiwa (Sudarno, 1996). Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan yang memadai, hal ini juga karena pada masa itu muncul tanam paksa yang diharuskan penduduk menanam tanaman tertentu.

Program kolonisasi atau Kolonisatieproof yang telah disetujui oleh parlemen Belanda dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan membentuk sebuah badan atau komisi,

Kolonisasi atau kolonisatieproof dilaksanakan oleh sebuah komisi Commise Voor Emigrate en Kolonisten Ban Imheemsen (Komisi Pusat Emigran dan Kolonisasi Pribumi) di Hindia Belanda. Pelaksanakan kolonisasi ini didukung juga dengan adanya brosur yang berisi tentang ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa dengan luas lahan pertanian dan perkebunan yang ada. Sementara itu di luar Pulau Jawa justru sebaliknya, jumlah penduduk relatif sedikit, sedangkan areal yang potensial untuk perkebunan dan pertanian masih sangat luas.

Dalam kaitannya dengan emigrasi, pemerintah kolonial Belanda mengadakan redistribusi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, mengingat kondisi pulau Jawa yang semakin padat penduduknya. Ada beberapa pemikiran mengapa penduduk terkonsentrasi di pulau Jawa. Menurut pemikiran Mohr seorang ahli geologi dan tanah berkebangsaan Belanda, kepadatan penduduk di pulau Jawa disebabkan keadaan tanah yang subur serta iklim yang menguntungkan bagi pertanian. Sementara dalam pandangan Fisher, ahli geografi berkebangsaan Inggris, adanya ketimpangan distribusi penduduk antara pulau Jawa dan luar Jawa disebabkan oleh kebijakan pemerintah Belanda yang Jawa sentris, sehingga pembangunan pusat-pusat pertumbuhan seperti pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan, juga prasarana pembangunan seperti

transportasi, komunikasi, dan irigasi lebih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Berdasarkan laporan dari pegawai kontroling yang tergabung di pusat organisasi pemerintahan Hindia Belanda yang bernama HEB. Schmalhausen, menyarankan kepada pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk di Jawa agar mengirimkan penduduk pulau Jawa untuk memenuhi tenaga kerja diluar pulau Jawa yang areal dan tenaga kerjanya kurang. Menanggapi laporan itu pemerintah merekomendasikan untuk pelaksanaan Kolonisasi tersebut. Gubernur Jendral Willem Rooseboom (1899-1904) membuat persiapan kegiatan tersebut dan menunjuk Residen wilayah Kedu HG Heyting untuk melakukan penelitian guna merealisasikan program perpindahan penduduk ini (Sudarno, 1996).

Setelah kegiatan penelitian Heyting berakhir, maka diperoleh kesimpulan bahwa program kolonisasi dapat dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun, jika tujuannya luar pulau Jawa maka Sumatera adalah wilayah yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut, seperti Sumatera Barat, Palembang, Bangkahulu (Bengkulu) dan Lampung, dengan total pengeluaran biaya untuk kegiatan perpindahan penduduk itu adalah f.5.028.900, yang meliputi ongkos per kepala keluarga, transportasi, alat alat dapur, alat alat pertanian, rumah tinggal bagi para imigran, pembangunan rumah

tenaga kesehatan, pengadaan bibit tanaman, gaji para petugas dan biaya perjalanan para petugas. Sedangkan rencana jumlah kepala keluarga yang akan dipindahkan selama sepuluh tahun adalah 5300 KK dengan rata-rata 530 KK pertahun (H.G., 1938). Pada tahap awal kolonisasi, setiap kepala keluarga peserta memperoleh premi sebesar 20 gulden, dibebaskan dari biaya transportasi yang nilainya sama dengan 50 gulden per keluarga, serta mendapat sumbangan biaya hidup sebesar 0,4 gulden per hari selama masa penyiapan tanah. Jumlah biaya langsung diperkirakan sekitar 300 gulden per keluarga yang mencakup premi, biaya transportasi, biaya makan 150 gulden, biaya bangunan rumah 65 gulden, pembelian alat-alat 13,5 gulden, ditambah 0,7 hektar tanah sawah dan 0,3 hektar tegalan serta pekarangan.

Laporan kegiatan yang dilakukan oleh Heyting di tolak oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk laporan yang kedua yang telah dilaksanakan oleh Heyting yang telah mencantumkan secara rinci berkaitan dengan jumlah penduduk dan biaya yang dibutuhkan, pemerintah menganggap proyek sepuluh tahun yang disampaikan oleh Heyting itu terlalu mengada-ada dengan biaya yang terlalu besar. Keinginan pemerintah pada awalnya adalah hanya ingin membatasi perpindahan penduduk di dalam pulau Jawa saja dari wilayah padat ke wilayah yang jarang penduduknya, namun

sebagai pertimbangan dari pemikiran Heyting itu dilakukan uji coba kolonisasi (*Kolonisatieproof*) dengan menetap yang terealisasi tahun 1905. Penduduk yang berhasil dipindahkan pada periode percobaan kolonisasi 1905-1911 adalah sekitar 4.800 orang. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk setiap peserta kolonisasi pada masa ini sekitar 750 gulden per keluarga. Jumlah yang besar tersebut termasuk anggaran untuk membuat fasilitas kolonisasi seperti pembuatan saluran irigasi, penyiapan lahan dan pemukiman, serta biaya administrasi.

Kolonisatieproof dilakukan di Lampung Gedong Tataan, dengan penduduk yang dikirim dari Karesidenan Kedu khususnya desa Bagelan, (*sehingga di Gedong Tataan juga ada desa awal yang diberi nama Bagelan*). Dipilihnya Kedu menurut analisis Heyting kondisinya memprihatinkan sering terjadi paceklik dan gagal panen karena kultur tanahnya tidak cukup baik dan irigasinya tidak menunjang. Sedangkan dipilihnya Gedong Tataan karena letaknya relative cukup dekat dari pulau Jawa.

Wilayah Gedung Tataan kontur tanahnya datar, memiliki sumber mata air yang cukup banyak sehingga sangat cocok menjadi percontohan Kolonisasi. Fase atau tahapan yang pertama ini termasuk dalam fase percobaan atau coba-coba dalam menyelenggarakan dan mencari dasar dalam pelaksanaan kolonisasi. Pada fase ini, Pemerintah kolonial menugasi Asisten

Residen H. G Heyting, dari Karesidenan Kedu ke daerah-daerah luar Jawa. Dalam hal ini penyelenggaraan kolonisasi fase ini, Heyting menghendaki supaya calon-calon kolonis harus terdiri dari petani yang sehat dan kuat untuk membangun suatu desa pertanian yang baik, berbeda dengan cara seleksi Van Diessel dimana ia berpendapat bahwa siapa saja bisa jadi kolonis pertanian yang baik asal dididik dengan baik dan benar. Penyelenggaraan kolonisasi pada fase percobaan kali ini dinilai sangat menghabiskan banyak pengeluaran, yang dikarenakan anggaran untuk kolonis begitu besar, dimulai dari anggaran keberangkatan, peralatan pendukung, alat untuk membangun tempat tinggal dan segala kebutuhan kolonis untuk penghidupannya. Oleh karena itu Pemerintah Belanda menghentikan program fase percobaan ini karena biaya yang mahal dalam penyelenggaraannya.

Tahun 1905, ketika pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Kolonisatie di wilayah Karesidenan Lampung, pemerintah Kolonial mendatangkan sebanyak 155 kk yang berasal dari Bagelan, Karesidenan Kedu, perpindahan pertama ini kemudian diikuti dengan pemindahan penduduk berikutnya yang berlangsung hingga tahun 1911 pada masa gubernur jendral AFW. Idenburg (1909-1916). Penduduk yang berhasil dipindahkan pada periode percobaan kolonisasi 1905-1911 adalah sekitar 4.800

orang. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk setiap peserta kolonisasi pada masa ini sekitar 750 gulden per keluarga. Jumlah yang besar tersebut termasuk anggaran untuk membuat fasilitas kolonisasi seperti pembuatan saluran irigasi, penyiapan lahan dan pemukiman, serta biaya administrasi.

Pada pelaksanaan kolonisasi periode percobaan ini, pemerintah kolonial Belanda boleh dibilang kurang serius menanganinya, yang disebabkan masalah internal mereka sendiri. Ada pro-kontra berkaitan dengan pelaksanaan kolonisasi, akibat masih adanya perbedaan pendapat mengenai kepadatan penduduk pulau Jawa. Mereka yang pro berpendapat penduduk pulau Jawa sudah padat, sementara yang kontra belum melihat adanya kondisi yang mendesak untuk memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa. Perpindahan penduduk di wilayah Karesidenan Lampung masa Hindia Belanda terbagi dalam tiga system dalam kurun waktu berbeda yaitu system yang total dibiayai tahun 1905-1911, sistem pinjaman Bank (Lampongsche Volksbanks) dan system bawon tahun 1932-1941. Pengaruh depresi ekonomi dalam memperlancar kolonisasi cukup signifikan. Koloniasasi juga dapat terus berlanjut hanya dengan sedikit bantuan finansial dari pemerintah. Mereka yang tertarik pindah hanya diberikan pinjaman uang 22-25 gulden setiap keluarga untuk biaya transportasi, pembelian alat-alat

pertanian, yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 2-3 tahun. Di tempat yang baru pemerintah hanya memberikan lahan secara gratis untuk diolah, hal ini juga mengingat beban pemerintah Belanda yang besar untuk menghadapi perang di Asia Timur Raya, yang akhirnya kekuasaan Belanda jatuh ke tangan Jepang.

Masa Pendudukan Jepang (Kokuminggakari)

Sejak tahun 1942 susunan pemerintahan di Lampung mengalami perubahan dengan perginya pejabat-pejabat kolonial Belanda dari Binnenlands Bestuur. Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, kegiatan transmigrasi tetap dilaksanakan. Akan tetapi karena sibuk dengan peperangan, rupanya penguasa Jepang tidak sempat melakukan pengadministrasian kegiatan transmigrasi seperti halnya pada jaman pemerintah kolonial Belanda, sehingga sangat sedikit dokumentasi mengenai transmigrasi yang bisa ditemukan. Perpindahan penduduk pemerintahan militer Jepang tahun 1942-1945, Dengan karakteristik yang berbeda, yang dibutuhkan adalah yang masih muda dan memiliki kekuatan fisik dan kebanyakan dari mereka adalah kaum laki laki. Salah satu acuan dari pendapat (Kurasawa, 1993) dalam bukunya Mobilisasi dan Kontrol, studi tentang perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945, yang mendeskripsikan kondisi pra dan pasca perpindahan penduduk tersebut dan

disebutkan bahwa perpindahan penduduk dilakukan sukarela dan setiap orang yang diberangkatkan menapat upah. Didalam buku ini juga digambarkan adanya dua jenis pengerahan penduduk yaitu dipekerjakan disekitar keresidenan di pulau jawa dan yang dipekerjakan diluar pulau Jawa bahkan ke manca Negara yang disebut Romusha.

Tidak hanya di bidang transmigrasi, kondisi kependudukan yang parah dimulai ketika tentara Jepang mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Belanda. Pada periode ini kondisi perekonomian di Indonesia sangat buruk. Beberapa komoditi seperti tekstil, alat-alat pertanian, bahan pangan menghilang dari pasaran. Terjadi pula mobilisasi tenaga kerja (romusha) untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan dan proyek-proyek pertahanan Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini karena tuntutan pembiayaan perang yang sangat besar, untuk menghadapi Sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Romusha dalam bahasa Jepang berarti pekerja, tetapi bagi bangsa Indonesia Romusha memiliki konotasi penderitaan yang luar biasa karena kekejaman Jepang dalam mengambil tenaga kerja Indonesia, kita mengenal Jugunlafu, penyiksaan, pelecehan, kuli paksa, kelaparan dan kematian. Hampir setiap hari didengar dan dilihat oleh masyarakat.

Awalnya pengerahan tenaga kerja ini dipropagandakan sebagai perekrutan

tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan swasta sebagai buruh tetap, tetapi setelah pertengahan tahun 1943 dimana kedudukan Jepang menapat serangan dari Sekutu, pengerahan tenaga kerja semakin intensif dan berubah menjadi kuli paksa untuk pembangunan pertahanan (Kurasawa, 1993). Diperkirakan selama kekuasaan Jepang, penduduk pulau Jawa yang berhasil dipindahkan ke luar Jawa melalui transmigrasi sekitar 2.000 orang, penderitaan yang luar biasa sebagai kuli paksa sebagai Romusha yang tidak lagi bekerja untuk perbaikan nasib, melainkan dipekerjakan untuk membangun benteng-benteng pertahanan Jepang dalam menghadapi peperangan.

Pengerahan romusha ini secara organisasi berada dibawah sebuah seksi di departemen Urusan Dalam negeri Jepang (Naimusho') kemudian ditangani oleh R'omukyoku sedangkan ditingkat keresidenan penanganan Romusha oleh Naiseibu atau Seksi Urusan Dalam. Ini membuktikan keseriusan Jepang dalam pengerahan tenaga kerja atau romusha untuk membantu membangun pertahanan dengan memberikan bekal kehidupan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk bekerja (menjadi Romusha), tetapi kenyataannya sejarah mencatat justru pada masa pendudukan jepang inilah eksploitasi tenaga kerja Indonesia tiak manusiawi, diluar kewajiban sebagai tenaga kerja. Banyak dari romusha itu tidak kembali lagi

karena kelaparan, karena penyiksaan dan meninggal dunia. Fasilitas kesehatan yang minim dan bahkan banyak diantara wanita pribumi dijadikan budak sex oleh tentara Jepang sebagai Jugun lafu, yang belum lama ini aanya tanda "berupa santunan" sebagai tanda maaf untuk peristiwa masa lalu yang mengerikan tersebut. Hal tersebut menimbulkan pergolakan dan pemberontakan di berbagai daerah seperti halnya dengan peristiwa Cot Pleng, Peristiwa, Indramayu, Singaparna, dan sebagainya.

Karesidenan Lampung termasuk salah satu tujuan pengerahan romusha yang berasal dari jawa yang lebih dikenal dengan nama Kokuminggakari, yang berlangsung masa pertengahan pendudukan Jepang, karena Jepang menyadari kemungkinan serangan balasan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, setelah pangkalan Amerika Serikat di rebut Jepang dan wilayah wilayah Negara yang tergabung dalam sekutu dikuasai oleh Jepang. Sikap pemerintah Jepang yang awalnya mengambil hati penduduk pribumi berubah menjadi kewajiban pengerahan manusia untuk membuat pertahanan militer dan suplai makanan. Kota Agung menjadi basis pertahanan Jepang di wilayah Lampung, sementara Purbolinggo menjadi basis pensuplai makanan untuk para tentara yang berperang. Penduduk yang dipindahkan dari pulau jawa sebanyak 12.000 orang. Yang ternyata berbanding terbalik dari

keterangan yang ada di dalam catatan Disnakertrans yang menyatakan bahwa Kokuminggarkari hanya dilaksanakan satu kali tahun 1943 yang memindahkan 6.329 KK atau 31.700 jiwa.

Pengeralahan penduduk yang sebagai Romusha adalah mereka yang tidak dilibatkan dalam pasukan ketentaraan atau pasukan yang dibuat Jepang untuk membantu dalam peperangan seperti, Seinendan, Keibodhan, Fujinkai maupun Kempetei. Karena pasukan militer dan semi militer ini digunakan untuk menghaapi serangan balasan sekutu. Nasibnya lebih baik daripada Romusha, makanan, pakaian dan kesehatan mereka lebih baik. Mereka hanya berlatih ilmu perang, bela diri dengan sangat keras mengingat waktu untuk pasukan bantuan berperang militer Jepang sangat singkat. Namun ternyata organisasi organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang justru banyak yang melakukan pemberontakan karena kesewenang wenangan Jepang, mereka merebut persenjataan Jepang, beberapa markas militer diserang dan senjatanya diambil oleh para PETA yang dapat dijadikan untuk pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya TNI.

Masa Pemerintahan Indonesia (Transmigrasi)

Pelaksanaan migrasi yang dilakukan oleh pemerintah setelah Indonesia merdeka, sebenarnya mengacu pada Istilah

Transmigrasi yang telah dikenalkan oleh Ir. Sukarno tahun 1927 yang dituliskan dalam surat kabar Soeloeh Indonesia. Transmigrasi mulai iberlakukan sekitar tahun 1950 untuk menggantikan istilah kolonisasi (Belanda), Romusha (Jepang) yang dianggap penting sebagai sarana pembangunan yang telah ditetapkan dalam GBHN yang menyebutkan bahwa perpindahan penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan lahan serta pengembangan daerah produksi pertanian dalam pembangunan daerah, peningkatan taraf hidup dan untuk kepentingan jangka panjang yang lebih rasional.

Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda tahun 1950 Negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno, melaksanakan program transmigrasi seperti yang pernah dilakukan masa penjajahan Belanda dan Pendudukan Jepang dilanjutkan dan diperluas cakupannya sampai Papua. Pada puncaknya antara tahun 1979 dan 1984, 535.000 keluarga (hampir 2,5 juta jiwa) pindah tempat tinggal melalui program transmigrasi. Dampak demografisnya sangat besar di sejumlah daerah; misalnya, pada tahun 1981, 60% dari 3 juta penduduk provinsi Lampung adalah transmigran.

Perlunya dilakukan transmigrasi karena pemerintah menghadapi permasalahan kependudukan yang timpang antara penduduk dengan luas tanah di

jawa mencapai angka 0,124 Ha dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 1961 setelah adanya sensus pencatatan jumlah penduduk di wilayah Madura dan Jawa mencapai 63 juta jiwa dan meningkat lagi sensus sepuluh tahun berikutnya pada tahun 1971 jumlah penduduknya meningkat mencapai 75 juta dan tahun 1973 kembali meningkat menjadi 80.287 juta jiwa. Atau 64% jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan penduduk diluar pulau jawa dan madura tahun 1961 jumlah penduduknya hanya 34 juta jiwa dan tahun 1971 sebanyak 40 juta jiwa. Akibatnya bahaya kelaparan, kriminalitas, dan lapangan pekerjaan sangat sulit didapatkan, banyak penduduk yang tidak memiliki lapangan pekerjaan, sementara di luar Jawa Madura banyak tanah yang belum tergarap¹⁶. Ketimpangan inilah yang dilakukan pemerintah awal kemerdekaan untuk mengembangkan usaha pertanian dan pekerjaan lainnya sehingga terciptanya satu komunitas Indonesia. Tidak lagi mengandalkan kesukuan, kekerabatan yang menjadikan pengkotakan kesukuan dengan peningkatan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya Transmigrasi yang merupakan kelanjutan dari program yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang tidak selamanya berjalan dengan baik, Dalam berbagai kasus, program ini gagal meningkatkan taraf hidup migran. Tanah dan iklim di daerah tujuan

umumnya tidak subur tanah vulkanis di Jawa dan Bali. Para pendatang biasanya merupakan orang-orang tanpa tanah yang tidak punya keterampilan bertani sehingga kesuksesan mereka terancam, sehingga tidak sedikit diantara mereka kembali lagi ke daerah asalnya, dengan alasan tidak betah dan lahan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Maksud pemerintah Indonesia dan komunitas pembangunan, tujuan program ini adalah memindahkan jutaan orang Indonesia dari pulau Jawa, Bali, dan Madura yang padat ke pulau-pulau luar yang penduduknya sedikit demi menciptakan kepadatan penduduk yang merata. Transmigrasi akan mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lahan dan kesempatan baru bagi para pendatang miskin. Transmigrasi juga akan menguntungkan Indonesia dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di pulau-pulau yang kurang padat penduduk. Program ini juga bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa dengan menciptakan identitas nasional Indonesia yang tunggal yang menggantikan identitas daerah. Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa tidak ada pemisahan "suku pribumi" dan pendatang di Indonesia, karena Indonesia adalah negara "suku pribumi yang dijalankan dan dipimpin oleh pribumi untuk pribumi". Oleh sebab itu makanya pemerintah gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya perpindahan penduduk untuk

mencapai kesejahteraan bersama melalui program transmigrasi.

Pada masa Orde Baru pelaksanaan Transmigrasi lebih terprogram dan tertata dengan baik yang dimasukkan dalam program pembangunan Lima Tahun (PELITA). Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru dengan tujuan mendukung ketahanan pangan dan tersedianya tempat tinggal, mendukung kebijakan energy alternative, pemerataan invests ke seluruh wilayah Indonesia dan mendukung ketahanan nasional, ketahanan pangan dan dapat mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Transmigrasi tidak hanya para petani saja tetapi veteran dan pramuka juga diikutsertakan hal ini sesuai dengan tujuan untuk mendukung ketahanan nasional.

Sampai tahun 1955 telah dilaksanakan pengiriman transmigrasi ke tanah Lampung tepatnya di Gedung Tataan Lampung Selatan (saat itu) sebanyak 5.491 Kepala Keluarga, sebagai tahap awal pendaratan di Teluk Betung. Kemudian hingga tahun 1969 dikirimkan kembali transmigran sebanyak 5.333 kepala keluarga yang ditempatkan di wilayah Sidomulyo Palas, Tanjungan dan Kecamatan Kedaton. Tahun 1974 kembali dikirimkan transmigrasi sebanyak 874 Kepala Keluarga dan ditempatkan di kecamatan Palas dan kecamatan Penengahan. Dan setelah itu tahun

1979/1980 Lampung sudah tidak menerima kembali Transmigran, walaupun ada hanya tinggal sisa-sisa yang belum diberangkatkan tahun tersebut dan direalisasikan tahun berikutnya. Hal ini perlu dilakukan karena tidak meratanya jumlah penduduk antara yang ada di pulau Jawa dengan penduduk diluar pulau Jawa, keadaan ini akan menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam kependudukan yang akan diikuti masalah masalah lain yang mungkin akan timbul. Kurangnya lahan, penebangan hutan di Jawa masih menjadi ancaman gejolak sosial yang perlu perhatian pemerintah untuk mencari daerah-daerah lain yang masih mungkin untuk dilakukan perpindahan penduduk. Karena Lampung sudah cukup untuk pengiriman penduduk mengingat jumlah penduduk transmigran dengan penduduk asli masyarakat Lampung lebih besar, yang nantinya akan menimbulkan masalah kependudukan baru.

Dampak Migrasi Penduduk

Meski kita ketahui besarnya muatan politik dalam setiap perpindahan penduduk yakni untuk pemenuhan tenaga kerja terutama pembukaan lahan baru, peristiwa migrasi penduduk menjadikan terwujudnya multicultural di suatu tempat. Migrasi atau Transmigrasi dilakukan untuk meratakan kepadatan penduduk dan membuka lahan baru untuk penghidupan di tempat yang baru. Transmigrasi diharapkan bisa

mengurangi kepadatan di pulau Jawa. Faktanya, beberapa orang berhasil dalam program transmigrasi dan menjadi kaya di tempat tersebut. Beberapa orang lainnya gagal karena kurang survive di tempat baru. Dampak perpindahan penduduk ada 2 macam, yaitu: dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mengurangi kepadatan penduduk bagi tempat yang ditinggalkan. Tak hanya itu, keberagaman budaya akan terwujud dan manusia akan saling mengenal satu sama lain. Dampak negatifnya adalah menambah masalah kependudukan bagi tempat tujuan. Kadang bisa berupa naiknya tingkat kriminalitas dan pengangguran. Selain itu, bagi tempat yang ditinggalkan bisa kekurangan tenaga kerja, contohnya desa yang seharusnya butuh tenaga kerja namun malah kekurangan gara-gara orang-orang pindah ke wilayah lain

Migrasi penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan tertentu yang masing masing berbeda etnis akan menimbulkan pembauran dalam aktifitas hingga memunculkan budaya yang heterogen karena adanya proses sosial yang alami. Perbedaan sikap dan sikap bertemu untuk menyesuaikan diri dalam berinteraksi untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Namun perbeaan budaya antara pendatang dengan masyarakat setempat memang sulit disatukan sehingga dibutuhkan integrasi dan keterbukaan

untuk menciptakan kesepahaman dibalik adanya perbedaaan.

Seperti pertimbangan untuk menempatkan orang Jawa di Metro dan sekitarnya, sebagai daerah kolonis yang bisa berdiri sendiri terlepas dari status milik marga, peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Mei 1937. Menurut Pendapat Patrice Levang bahwa karakter wilayah di bagian tengah dan timur Provinsi Lampung hingga ke arah selatan merupakan daerah subur karena merupakan endapan sungai dan endapan vulkanis. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah demografi (pola permukiman) sedikit banyak terpengaruh oleh ekologi. Ciri tersebut merupakan karakteristik yang cocok untuk lahan persawahan. Selain itu daerah Lampung di bagian tengah dan timur merupakan daerah yang dekat dengan muara sungai-sungai besar di Lampung yang bersumber dari Way Sekampung, Sungai Tulang Bawang, Sungai Pegadungan dan Way Seputih, yang kesemuanya berasal dari Bukit Barisan dan berakhir di laut Jawa. Wilayah-wilayah di bagian tengah, timur dan sebagian selatan di Lampung ini memang menjadi destinasi yang paling cocok dengan karakter para transmigran sehingga membuat penumpukan jumlah transmigran di daerah-daerah ini. Perkembangan penduduk di Lampung bagian tengah dan se Wilayah Lampung bagian tengah yang mempunyai kontur tanah datar dan subur memang menjadi

daerah favorit tujuan para pendatang dibandingkan wilayah Lampung lainnya.

Dengan adanya percampuran budaya di beberapa daerah di Lampung, menunjukkan adanya kerjasama dan penataan pemerintah yang cukup baik saling pengertian serta perkawinan campuran pun telah terjadi sehingga kehidupan multikultural telah terjalin semestinya, sehingga kekhawatiran awal akan terjadi disintegrasi multikultural tampaknya tidak mungkin terjadi, selama antara pendatang dan penduduk asli saling pengertian, pemerintah tidak pilih kasih dan kehidupan dapat berjalan dengan seimbang. Dan untuk perkembangan kehidupan yang multikultural tersebut semua orang yang tinggal di daerah ini menyebut dirinya adalah orang Lampung dimanapun mereka tinggal di daerah Lampung. Integrasi memiliki dua rasa, yaitu ketika kontrol atas konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu dan menciptakan keseluruhan serta menyatukan unsur-unsur tertentu, hal inilah yang menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat baik warga setempat maupun para Transmigran.

Selain hal itu setiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Hal ini yang tentu saja diharapkan dapat terlaksana pada masyarakat transmigrasi, dengan adanya transmigrasi masyarakat yang multikultural maka akan tercipta

integrasi. Dengan kehidupan yang Multikultural telah mengubah dalam pembangunan ekonomi di Lampung yang ditandai dengan munculnya pusat-pusat ekonomi di propinsi Lampung baik ditingkat propinsi, Kabupaten hingga pedesaan yang berawal dari desa-desa Transmigran. Geliat pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat memicu pemekaran wilayah baik desa-desa persiapan menjadi desa induk maupun pemekaran kecamatan hingga pemekaran kabupaten dan Kota pada saat ini, seperti halnya Kabupaten Way Kanan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Tanggamus, Pringsewu juga Kota Metro. Dampak lain yang menjadikan wilayah ini cepat berkembang adalah jika dahulu masa kolonial dan Pendudukan Jepang kegiatan migrasi hanya diperuntukkan bagi kepentingan mereka dan rata-rata yang dikirim orang-orang yang tidak memiliki keahlian pertanian dan tidak cukup pengalaman, maka pada masa republik Indonesia yang dikirim adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang pertanian sehingga ditempat baru segera dapat mempraktekkan pengalaman dan pengetahuannya tersebut. Sehingga terciptalah Propinsi Lampung yang berkembang dengan keberagaman dan multikultural yang mengedepankan kebersamaan dan kemajuan.

PENUTUP

Tidak ada kebijakan yang tidak berdampak, terutama jika berkaitan dengan kebijakan pemindahan penduduk. Benturan kepentingan kerap terjadi antara penduduk asli dan pendatang. Terlebih seperti di Lampung yang sudah puluhan tahun menjadi daerah tujuan pemindahan penduduk. Kolonisasi, pengerahan Romusha dan Transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah pada masa yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu ingin memindahkan penduduk pulau Jawa yang melebihi kapasitas dalam jumlah dibandingkan dengan luas tanah garapan yang ada. Jika hal itu tidak dilakukan akan memunculkan masalah besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, gesekan dengan penduduk setempat pasti ada tetapi dengan pemahaman dan kultur yang berbeda menjadi sebuah kebersamaan menjadikan multikultural yang bisa dengan cepat membangun sebuah wilayah seperti halnya di Lampung. Program migrasi yang dilakukan ditiga masa pemerintahan dimaksudkan untuk meningkatkan komoditi utama dalam rangka membangun sarana fisik di daerah yang kekurangan tenaga kerja tetapi memiliki luas lahan yang melimpah. Hal ini memerlukan pembiayaan yang luar biasa, karena ini merupakan program pemerintah maka biaya semua ditanggung oleh pemerintah, baik dari persiapan, pemberangkatan hingga penempatan. Kolonisasi dan Transmigrasi berupaya untuk menyebarkan penduduk dan

membuka lahan baru demi meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, sementara Kokumiggakari berupaya melakukan pengerahan tenaga kerja murni tidak disertai keluarganya mereka hanya diambil tenaganya membantu pertahanan Jepang, karena perbedaan tersebut apa yang alami oleh para imigran juga berbeda. Dalam perjalanan waktu memang ada kaum kolonis atau kaum Transmigran yang kembali ke daerah asalnya, tetapi tidak sedikit juga yang menetap dan menjadi warga setempat, sedangkan Romusha hampir semuanya kembali ke daerah asal kecuali yang meninggal ditempat kerja. Dari perkembangan yang dialami nyatalah manfaat yang diperoleh para migrant untuk meningkatkan taraf hidupnya, seperti halnya kolonis di Bagelan Gedong Tataan mereka merasakan lebih baik daripada di daerah asalnya, bahkan mereka menjadi pionir pembuka lahan pertanian dan perkebunan. Setelah menetap sekian lama di Lampung bahkan bertambah dari keluarga mereka sendiri yang berarti adanya kontribusi bagi sumber daya manusia di Propinsi Lampung. Dan pada perkembangannya Lampung menjadi tempat terbuka dan manfaat nyata dengan dibangunnya sarana dan prasarana jalur distribusi perekonomian. Kearifan lokal yang saling menjaga tradisi masing masing terus dipupuk dan terpelihara, karena sekalipun berbeda dalam penerapan budaya itu sesungguhnya nilai nilai budaya itu

bermuara pada satu tujuan tercapainya ketentraman dan keselarasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbedahin, A. V. (2019). Sustainable development, Education for Sustainable Development, and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Emergence, efficacy, eminence, and future. *Sustainable Development*, 27(4), 669-680. <https://doi.org/10.1002/sd.1931>
- Anggraeni, W. D., & Setiawan, J. (2022). Character Education Values of Radin Inten II 's Against The Dutch Colonization For Learning Local History. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 4267-4278. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i3.2095>
- Bavlı, Ö. (2016). Investigation into the Effects of Eight Weeks of Step Aerobic Dance Practice on Static Balance, Flexibility and Selected Basketball Skills in Young Basketball Players. *Journal of Education and Training Studies*, 4(5). <https://doi.org/10.11114/jets.v4i5.1516>
- Beghetto, R. A. (2007). Ideational code-switching: Walking the talk about supporting student creativity in the classroom. *Roepers Review*, 29(4), 265-270. <https://doi.org/10.1080/02783190709554421>
- Dinda, L. O., Aman, A., & Setiawan, J. (2019). Sejarah Pembuatan Dan Makna Simbolik Pakaian Adat Muna. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 11(3), 449. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i3.536>
- H.G., H. (1938). *De Les Van Wortelvast Gedongtataan Dalam "De Indhishe Gids" Tahun ke 60*. Jakarta: Jakarta Press.
- Heeren, H. J. (1979). *Transmigrasi di Indonesia. Terjemahan Hans Daeng dan Wille Koen*. Jakarta: Gramedia.
- HERI, NURHAJI, S. A. (2017). PERKEMBANGAN POLITIK ETIS SEKTOR PENDIDIKAN DI SURABAYA PADA MASA PEMERINTAHAN ALEXANDER WILLEM FREDERIK IDENBERG TAHUN 1909-1916. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 96-110.
- Kartodirdjo, S. (2018). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa tahun 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.
- Putri, S. M. (2017). The effect of colonization on the formation of criminal groups in Lampung (in Indonesian). *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 1(1), 49-62. <https://doi.org/10.22437/titian.v1i1.3969>
- Setiawan, J. (2023). Character Values of Independence Hadratussyekh K.H. M. Hasyim Asy'ari. *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume*, 11(1), 17-28. <https://doi.org/10.24127/hj.v11i1.6469>
- Setiawan, J., & Aman. (2018). K. H. Ahmad Hanafiah: Indonesian independence fighter from Lampung Residency (in Indonesian). *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(1), 129-137. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i1.1252>
- Setiawan, N. (2006). Satu abad transmigrasi di Indonesia: perjalanan sejarah pelaksanaan, 1905-2005. *HISTORIA : Jurnal Ilmu Sejarah*, 3(1), 13-35.
- Sinakou, E., Boeve-de Pauw, J., Goossens, M., & Van Petegem, P. (2018). Academics in the field of Education for Sustainable Development: Their conceptions of sustainable

development. *Journal of Cleaner Production*, 184, 321-332.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.279>

Sudarno. (1996). *Kolonisasi di Gedongtataan (Lampung) tahun 1905-1917 Makalah untuk Konggres Nasional Sejarah Tahun 1996*. Jakarta: Ditjarahmitra.

Wasino, E. S. H. (2020). *Metode Penelitian Sejarah : dari Riset hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama.

